



SIARAN PERS

KEMENTERIAN PARIWISATA

Di Tengah Tekanan Global, Kemenpar Siapkan Strategi Jaga Target Pariwisata 2026

Jakarta, 1 April 2026 –Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan rencana kerja Kementerian Pariwisata tahun 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR, Saleh P Daulay. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga kinerja sektor pariwisata tetap solid, meskipun menghadapi tantangan global yang dinamis.

Dalam paparannya, Menteri Pariwisata menjelaskan bahwa program prioritas Kemenpar tahun 2026 diarahkan pada penguatan **pariwisata berkualitas yang aman, berkelanjutan, dan berdampak pada ekonomi masyarakat**. Salah satu fokus utama adalah peningkatan keselamatan berwisata melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi bagi pemandu wisata, penyusunan pedoman keselamatan destinasi, hingga pemetaan kawasan wisata rawan bencana. Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengembangan lebih dari 6.200 desa wisata melalui pendampingan masyarakat, sertifikasi desa wisata, serta penguatan jejaring ekonomi lokal berbasis pariwisata.



Pariwisata berkualitas akan terus diperkuat dengan terus melanjutkan program Wonderful Indonesia Gastronomi, Wonderful Indonesia Wellness, Event by Indonesia dan pengembangan digitalisasi pariwisata Indonesia melalui program Torism 5.0 yang sudah dimulai sejak tahun 2025.

Dinamika Global dan Pariwisata Indonesia

Di tengah upaya penguatan program tersebut, sektor pariwisata global saat ini menghadapi dampak dari konflik di Timur Tengah. Penutupan wilayah udara Iran pada periode 28 Februari hingga 28 Maret 2026 menyebabkan gangguan penerbangan dari enam hub utama penerbangan internasional—Abu Dhabi, Doha, Dubai, Jeddah, Madinah, dan Muscat—yang berkontribusi pada pembatalan sekitar **770 penerbangan** menuju Jakarta, Bali, dan Medan. Situasi ini diperkirakan menyebabkan potensi kehilangan sekitar **60 ribu kunjungan wisatawan mancanegara** dengan potensi devisa yang tidak terealisasi mencapai sekitar **Rp2,04 triliun**.

“Dinamika geopolitik global tentu memberikan tekanan terhadap sektor pariwisata. Namun kami terus melakukan langkah-langkah mitigasi agar target kinerja pariwisata nasional tetap terjaga,” ujar Menteri Pariwisata.

Tekanan terhadap sektor pariwisata juga muncul dari kenaikan harga energi global. Harga minyak mentah dunia meningkat lebih dari **52 persen**, dari sekitar 67 dolar AS per barel menjadi lebih dari 102 dolar AS per barel dalam kurun waktu satu bulan. Kondisi ini memicu kenaikan biaya transportasi melalui penerapan *fuel surcharge* oleh berbagai maskapai internasional serta peningkatan tarif moda transportasi lintas negara.



Menghadapi situasi tersebut, Kementerian Pariwisata telah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi untuk menjaga pencapaian target **16–17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2026**. Strategi tersebut antara lain melakukan pivot pasar ke kawasan **Asia Tenggara, Asia Timur, dan pasar medium-haul**, memperkuat kampanye digital internasional, serta mengoptimalkan kerja sama dengan maskapai yang memiliki rute langsung ke Eropa dan Amerika. Pemerintah juga mendorong penyelenggaraan event lintas batas di kawasan perbatasan serta memperkuat promosi wisata nusantara guna menjaga tingkat hunian destinasi wisata di dalam negeri.

“Di tengah tekanan global, kita perlu bergerak lebih adaptif. Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional,” jelas Menteri Pariwisata.

Lebih lanjut, Menteri Pariwisata menegaskan bahwa pencapaian target kinerja pariwisata nasional membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah mendorong sejumlah langkah strategis seperti pemberian insentif penerbangan yang relevan, kebijakan bebas visa kunjungan, penambahan kapasitas kursi penerbangan, serta penguatan anggaran promosi pariwisata agar Indonesia tetap kompetitif di tengah persaingan global.

“Kami percaya bahwa dengan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga, serta dukungan DPR RI, sektor pariwisata Indonesia akan tetap tangguh dan mampu menjaga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Menteri Pariwisata.



Dalam pandangannya Ketua Komisi VII, Saleh Daulay mengapresiasi strategi mitigasi yang disiapkan Kementerian Pariwisata dalam menghadapi perkembangan dinamika global. Di sisi lain Komisi VII meminta penguatan konektivitas dan pergerakan wisatawan nusantara di tengah situasi ketidakpastian global pada saat ini.

Sementara itu anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan meminta Kementerian Pariwisata untuk mempelajari pola *shifting* akibat perubahan strategi ini, karena ada perbedaan *behaviour* antara wisatawan yang *long haul* (Eropa dan Amerika) dan *medium haul* (Asia Timur dan Asia Selatan) dan *short haul* (ASEAN).

Putra secara spesifik meminta pemerintah segera memberikan bebas visa terutama untuk wisatawan Tiongkok dan Australia agar *shifting* strategi Kementerian Pariwisata ini menjadi kebijakan nasional.

“Jangan ada ego sektoral lagi, kami mendukung Ibu Menteri harus memimpin pemberian bebas visa oleh pemerintah bagi wisatawan terutama Tiongkok dan Australia”, kata Putra Nababan.

Biro Komunikasi

Kementerian Pariwisata

Klik, follow, dan subscribe website & medsos kami 📌

Website <https://kemenpar.go.id/>

Instagram @kemenpar.ri

Twitter/X @KemenPariwisata

Tiktok @kemenpariwisata

Facebook Kementerian Pariwisata RI

Youtube Kementerian Pariwisata